

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak penduduk. Agar penduduk Indonesia dapat sejahtera secara ekonomi maka perekonomian Indonesia harus selalu bergerak. Pemerintah sangat berperan dalam pembangunan perekonomian rakyat maupun dalam instansi pemerintahan. Pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari setiap instansi pemerintahan agar terciptanya lingkungan yang dapat memacu perilaku yang positif dan manajemen yang baik. Terutama dapat mendorong seluruh pihak agar memiliki tanggung jawab dan kesadaran tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian internal.

Dinas Pariwisata Kota Palembang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengembangkan wisata alam maupun buatan. Pemerintah daerah maupun kota ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan wisata, serta ikut berperan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yang dilakukan oleh instansi Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Mengingat betapa pentingnya siklus pengeluaran kas bagi suatu instansi pemerintahan maupun perusahaan, keputusan - keputusan manajemen yang berkaitan dengan siklus ini haruslah didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yang cermat. Untuk itu, tentunya diperlukan data berupa laporan dan analisis yang dapat diandalkan. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen dan pemerintahan dalam siklus pengeluaran kas secara tepat diperlukan pengendalian internal terhadap pengelolaan pengeluaran kas yang memadai.

Dinas Pariwisata melakukan pengeluaran kas dalam pengadaan barang, seperti alat tulis kantor, pengadaan *ac*, pengadaan *fingerprint*, papan nama Dinas Pariwisata (cetakan non menklatur) dilakukan dengan sistem kontrak harga satuan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk membeli suatu barang. Terdapat pada pasal 1 angka 1 peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada sistem pengendalian internal pemerintah terdapat pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pada instansi pemerintah ini dalam hal sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas terdapat permasalahan yaitu pada petugas yang bertanggung jawab menyimpan kas merangkap sebagai petugas pencatatan transaksi pengeluaran kas, petugas yang bertanggung jawab atas pembelian atau pengadaan barang merangkap sebagai penyimpanan arsip dokumen seperti nota dinas, faktur pajak pembelian barang, serta surat - surat lainnya, petugas pada bagian penyimpanan barang merangkap sebagai petugas menerima barang masuk dari rekan kerja pada perusahaan tersebut, dan pada petugas penyimpanan arsip surat masuk merangkap sebagai petugas pembuat laporan rencana kerja anggaran satuan perangkat daerah (RKA SKPD) pada kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Adapun data pengeluaran kas yang akan dianalisis yaitu berupa data faktur pajak atas pembelian barang, nota dinas, surat perintah kerja, kwitansi, serta laporan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD), surat penawaran pekerjaan, surat penawaran harga, surat acara serah terima, yang akan dianalisis untuk memecahkan suatu

masalah pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas atas pengadaan barang pada kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Dengan ini penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul “**Analisis sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas atas pengadaan barang pada Dinas Pariwisata Kota Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanapengendalian internal terhadap pengeluaran kas atas pengadaanbarang pada kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dari yang ada, maka penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas pada Dinas Pariwisata Kota Palembang mengenai Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas atas pengadaan barang secara *cash* pada Dinas Pariwisata Kota Palembang.

1.4 Tujuan Dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah mengetahui sistem pengendalian internalpengeluaran kas atas pengadaan barang yang dijalankan pada Dinas Pariwisata Kota Palembang meliputi sebagai berikut :

1. Prosedur pengadaan barang,
2. Dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang, dan
3. Pihak yang terkait dalam pengadaan barang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan instansi pemerintahan dalam mengambil keputusan, serta dapat digunakan untuk menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas atas pengadaan barang pada Dinas Pariwisata Kota Palembang.